ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.3, No.2, Januari 2024

Problematika Keikutsertaan Media Pers Bertarung dalam Pemilu

Suf Kasman[1], Jumarni N[2], Sukma Dewi Yanti[3]
[1,2,3]Universitas Negeri Alauddin Makassar
E-mail: suf.kasman@uin-alauddin.ac.id[1]

Article History:
Received: 11 Januari 2024
Revised: 21 Januari 2024
Accepted: 24 Januari 2024

Keywords: *Problematika, Keikutsertaan, Media Pers, Pemilu*

Abstract: *Dalam sistem pemerintahan demokrasi, media massa memiliki peran sentral sebagai pembawa informasi yang akurat dan seimbang kepada publik. Kode Etika Jurnalistik menekankan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam melaporkan peristiwa. Tradisi media independen, terutama di Eropa dan Amerika, mengedepankan nilai kebebasan pers. Hubungan antara media dan pemerintah harus dibangun atas dasar kemitraan dan saling menghormati, sambil menjaga tanggung jawab terhadap kebenaran informasi. Namun, media dihadapkan pada sejumlah problematika dalam konteks pemilu, termasuk disrupsi digital, konsentrasi kepemilikan media, dan kekhawatiran terkait ketidakadilan dalam pemberitaan politik. Tantangan media ke depan mencakup partisanship, biaya tinggi dalam proses politik, dan pembatasan terhadap penggunaan media asing. Dalam menghadapi semua ini, penting untuk terus memperjuangkan transparansi, kenetralan, dan kebebasan media sebagai pilar penting dalam membangun demokrasi.*

PENDAHULUAN

Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, baik media massa maupun media sosial mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, media memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, menjadi kebutuhan hampir di setiap aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya menjadi pendorong utama perkembangan media. Dalam evolusi budaya dan teknologi, media memiliki peran yang tak terelakkan. Media massa dan media sosial kini menjadi bagian integral dari perkembangan budaya manusia, menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Setiap orang menggantungkan diri pada media, di mana informasi yang disajikan di dalamnya menjadi kebutuhan dasar bagi individu, masyarakat, organisasi, bahkan dalam konteks budaya suatu daerah.

Menjelang pemilu, media umumnya mengadopsi pendekatan 'jurnalisme pacuan kuda', yang terfokus pada hasil survei elektabilitas kandidat dari berbagai lembaga survei, persaingan antar calon presiden atau kepala daerah, persaingan antar partai, dan persaingan antar calon legislatif. Media cenderung menyoroti persaingan yang intens antar peserta pemilu, baik individu maupun partai, dengan tujuan memenangkan pemilihan. Di masa lalu, pemberitaan pemilu didominasi oleh peran partai-partai besar, sementara partai kecil tidak hanya terlupakan, tetapi bahkan diabaikan sepenuhnya. Saat mencapai tahap pemungutan suara, berita akan fokus pada hasil

quick count dengan analisis dari sejumlah pengamat politik, menciptakan suatu ritus yang berulang setiap pemilu.

Gaya liputan pemilu konvensional dengan pendekatan elitis sebaiknya ditinggalkan. Media dan wartawan perlu mengubah mindset, memandang pemilih sebagai subyek bukan obyek. Fokus harus bergeser dari apa yang diucapkan caleg atau kandidat ke apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pemilih dan masyarakat. Media tidak seharusnya hanya menjadi corong bagi partai dan kandidat, melainkan harus memberikan perhatian khusus kepada kaum muda, perempuan, kelompok minoritas (etnis, agama/kepercayaan, adat, dan minoritas seksual), pekerja migran, korban pelanggaran HAM, masyarakat adat tertinggal, pekerja migran, kelompok penyandang disabilitas, dan individu yang selama ini terpinggirkan. Wartawan dan media perlu menangkap keinginan, aspirasi, dan impian mereka untuk masa depan Indonesia. Dari situlah media dan publik dapat merekonstruksi kriteria dan sosok pemimpin ideal beserta program yang diperlukan untuk membangun Indonesia yang lebih baik (Rahayu, 2022).

Permasalahan politik muncul ketika oligarki media dan ketua umum partai politik menyokong kandidat Capres-Cawapres dalam Pilpres, mengakibatkan pengaruh ini terhadap kepemimpinan partai politik dan orientasi politik pemberitaan dari bisnis media yang dimilikinya. Hal ini termasuk dalam pemberitaan selama kampanye pemilu. Padahal, pemilu seharusnya memberikan hak suara yang sama kepada setiap warga untuk menentukan pemimpin negara. Pemilu menjadikan setiap rakyat, sebagai pemilik sumber daya suara, penting bagi kandidat untuk secara resmi menjadi penjabat publik. Pemberitaan yang terkait dengan kepentingan ini dapat memengaruhi keputusan rakyat. Dukungan oligarki media pada kandidat menciptakan pemberitaan yang bias, di mana pers seringkali hanya menjadi alat, senjata, dan amplifikasi untuk kepentingan kandidat yang didukung oleh oligarki media tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, media massa memiliki peran sentral. Oleh karena itu, penyampaian berita dan informasi kepada publik harus didasarkan pada prinsip berita yang akurat, seimbang, dan tanpa tendensi buruk. Kode Etika Jurnalistik menegaskan bahwa pelaporan peristiwa atau fakta seharusnya sesuai dengan nurani tanpa intervensi, tekanan, atau campur tangan dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers (Suyanto, 2010). Benar, posisi jurnalistik yang jelas adalah independen dan otonom dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.

Tradisi media yang independen sering ditemukan di negara-negara Eropa dan Amerika. Kedua wilayah tersebut dikenal karena menganut nilai kebebasan dan menghargai kebebasan pers dalam mengekspresikan opini publik. Kebebasan pers ini didukung oleh sistem pers yang bertanggung jawab terhadap hati nurani sendiri, hak-hak asasi warga negara, kepentingan umum yang dimiliki pemerintah, dan juga tanggung jawab terhadap rekan seprofesi. Secara ideal, tanggung jawab pers mencakup hubungan dengan pemerintah, media, dan masyarakat (Hisyam, 2003).

Tanggung jawab pers terhadap pemerintah, pers, dan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting. Meskipun kebebasan media dijamin, media massa diharapkan menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah bukan hanya objek berita, melainkan juga subjek yang dilibatkan dalam pemberitaan. Media massa dianggap sebagai mitra bagi masyarakat dan pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Sularto, media dan pemerintah bermitra dalam kehidupan politik demokratis karena tiga hal tertentu.

Pertama, hubungan antara pers dan pemerintah dibawa oleh kepentingan bersama untuk

menyampaikan dan menerima pesan, serta untuk melaksanakan kontrol guna meningkatkan pelayanan kepada kepentingan rakyat. Peran pers telah menjadi kebutuhan masyarakat sejak dulu, dan hal ini berlanjut hingga zaman sekarang dan masa mendatang.

Kedua, hubungan ini didasarkan pada semangat kerjasama dan kekeluargaan, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Meskipun kebersamaan ini tidak mengurangi peran masing-masing pihak, namun dapat menjadi sumber kreativitas dan saling merangsang, sekaligus mungkin menciptakan perbedaan pandangan dan ketegangan. Hal ini dianggap sebagai keadaan tak terhindarkan yang dapat diatasi melalui dialog dan upaya lainnya.

Ketiga, interaksi positif tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau melemahkan peran kontrol dan koreksi media. Sebaliknya, interaksi tersebut mempengaruhi arah interaksi dengan cara yang tidak membatasi, melainkan memperluasnya, seiring dengan perkembangan masyarakat (Sularto, 2011).

Dengan merujuk pada tiga poin tersebut, penting bagi media dan pemerintah untuk membangun hubungan yang saling menghormati, memahami batasan, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan liputan dan publikasi. Media, sebagai aktor kunci, memiliki peran penting dalam mendorong demokrasi. Media massa dapat dianggap sebagai duta kepercayaan yang membangun tradisi demokrasi dalam kontestasi politik. Di era informasi ini, media selalu dihadapkan pada tuntutan untuk bersikap cermat dan tidak keliru dalam membentuk opini publik. Khususnya dalam ajang pilkada, media perlu bersikap selektif dalam membentuk citra tokoh dan figur politisi dalam ranah politik formal.

Problematika Pers dalam Kontestasi Pemilu

Dalam setiap siklus pemilihan umum, perebutan jabatan politik merupakan peristiwa sosial yang penting. Karena pemilu dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan sosial masyarakat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan melalui pemimpin yang dianggap mewakili pilihan setiap orang untuk melakukan perubahan. Maka pemilu ini menjadi topik perbincangan yang hangat untuk dibincangkan di kalangan masyarakat agar bisa mewujudkan harapan dari masing-masing pemilih.

Berkaitan dengan pemilu, ada banyak aspek yang perlu mendapat perhatian untuk tersenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Mulai dari penyelenggaraan pemilu,panitia pemilu, aparat pengawasan pemilu bahkan keterlibat media dalam mengawas pemilu,. Media merupakan salah satu komponen sistem demokrasi sehingga perannya sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas politik termasuk dalam pemilu. Media berperan sebagai *check on* atau balance terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan pada sistem demokrasi. Jadi keberadaan media berada pada posisi untuk melindungi masyarakat, termasuk pendidikan, pendidikan politik, dan pendidikan pemilih.

Media pers memiliki peluang yang besar dalam menyukseskan pemilu terutama dalam berinteraksi dan berbagi informasi. Selain itu media pers merupakan platform yang sangat menjanjikan yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik atau kandidat untuk memenangkan pemilu. Membangun reputasi online yang positif di media adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh banyak politisi dan partai politik, karena hal ini dianggap relatif sederhana dan praktis dan merupakan alat yang berguna untuk mendapatkan dukungan dan suara dari pemilih baru. Disinformasi mengenai politik yang tidak didasarkan pada kenyataan juga akan menggoyahkan media sosial, berpotensi memecah belah masyarakat dan mematikan pemilih baru.

Secara eksplisit beberapa problematika keikutsertaan media pers dalam pemilu dapat diuraikan sebagai berikut; salah satunya adalah adanya disrupsi digital. Yakni suatu kondisi yang

menyebabkan terjadinya perubahan besar dengan adanya inovasi yang fundamental karena keberadaan teknologi digital yang memiliki dampak besar di berbagai aspek kehidupan manusia. Dikutip dari perkataan Anggota Dewan Pers Totok Suryanto pada Workshop Peliputan Pemilu 2024" di Semarang, Jumat (2/7/2023) bahwasanya disrupsi digital yang membanjiri informasi di berbagai perangkat digital merupakan tantangan tersendiri bagi media pers, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024. Perubahan yang terjadi akibat disrupsi digital mendorong munculnya banyaknya media khususnya media 'online' sehingga perubahan ini memimbulkan sebuah kondisi ibarat pisau bermata dua yakni memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan. Dimana disrupsi digital seperti ini menimbulkan banyak dampak . Salah satunya bakat kognitif seseorang menjadi sasaran utama atas ketergantungan atau bahkan kecanduan terhadap lingkungan digital. Selain itu, pertumbuhan berbagai jenis kejahatan dunia maya menunjukkan bahwa bahaya kejahatan lainnya juga semakin umum terjadi. Dengan banyaknya informasi yang tersebar dan di berbagai platform digital dan begitu mudahnya untuk diakses, maka media memiliki tantangan tersendiri untuk mendapatkan *"trust"* atau kepercayaan dari masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap media tentunya menjadi problematika keikusertaan media dalam pemilu sebab media harus memastikan bahwa hasil liputan, produk jurnalistik yang dihasilkan dan disebar adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat menjadi pegangan publik.

Selain daripada itu beberapa hal yang menjadi problematika media pers dalam keikutsertaan pemilu yakni adanya oligarki media yang yang mempengaruhi profesianalisme dan independensi media akibat media ikut terafiliasi dengan partai politik. Dikutip dari Kompas, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menemukan masalah yang dapat memengaruhi profesionalisme dan independensi media akibat pemilik media terafiliasi dengan partai politik yakni *pertama* adanya potensi intervensi ke ruang redaksi untuk kepentingan politik pemilik media, *kedua* swasensor berita berkaitan dengan pemilik media, *ketiga* jurnalis tidak akan leluasa menolak perintah atasan, *keempat* jurnalis tidak akan berani melapor ketika terjadi suatu ketimpangan dalam berita yang disebarkan atau karena hal lainnya, *kelima* kepercayaan publik terhadap pers semakin tergerus dengan adanya keberpihakan serta normalisasi komunitas pers terhadap penyalahgunaan pers (Kompas, 2023). Gejala ini dapat terjadi ketika pemilik media merupakan ketua umum atau anggota partai politik, berafiliasi dengan berbagai partai politik, atau bahkan menjadi calon anggota legislatif," kata Sasmito Madrim pada kegiatan peluncuran hasil riset Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia di Gedung Dewan Pers Jakarta, Kamis (23/11/2023). Selain itu Sasmito menambahkan, jurnalis di masa kini menjadi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan pemilik media.. Bahkan di tengah disrupsi digital, ada banyak jurnalis yang di-PHK sehingga menjadikan posisi jurnalis semakin lemah. Apalagi, tidak semua media mempunyai serikat pekerja yang membuat posisi tawar jurnalis tidak kuat dan menjadikan sebagian besar jurnalis untuk enggan bertindak atau melapor ketika terjadi pelanggaran.

Problematika media pers selanjutnya adalah adanya konsentrasi kepemilikan media semakin terpusat (Winters, 2014). Berkembangnya digitalisasi telah membuat industri media massa di Indonesia mengalami pemusatan dan konglomerasi, sehingga memantik para oligark pemilik media menjadi semakin kaya sekaligus berpengaruh secara politik yang tentunya berefek pada netralitas media. Revolusi digital tersebut membentuk beberapa hal, pertama, pemilik media cenderung lebih terlibat dalam politik dan mempunyai pengaruh pada pemilihan umum dan pemberitaan politik. Kedua, pemilik menjadi jauh lebih kaya dibandingkan sebelumnya di era digital. Ketiga, perusahaan media mulai semakin menyerupai dinasti (Tapsell, 2017). Oleh karena itu, pemberitaan politik menjadi lebih buruk karena tumbuhnya konglomerat, pengaruh pemilik media, dan struktur kekuasaan yang lebih mirip dinasti yang mana hal ini tentu mempengaruhi

keikutsertaan dalam kontestasi pemilu.

Tantangan Media ke Depan

Di tengah arus globalisasi dan arus informasi, media memang memiliki peran penting dalam pemilu dan pilkada, terutama dalam pembentukan citra calon dan memberikan ruang untuk iklan serta kampanye. Namun, kekhawatiran terkait ketidakadilan media dalam memberikan ruang politik dan hak siaran kepada semua kontestan, yang terkadang menyebabkan diskriminasi dalam pemberitaan.

Penting untuk terus memperjuangkan adilnya perlakuan media terhadap semua kandidat, sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang seimbang dan objektif. Transparansi dalam proses pemberitaan dan penyiaran, serta pengawasan terhadap praktik-praktik diskriminatif, dapat membantu memastikan bahwa media memainkan peran yang konstruktif dan adil dalam proses demokrasi.

Pertama, media massa belakangan ini cenderung bersifat partisan terhadap partai politik, terutama ketika pemilik media terlibat secara langsung dalam dunia politik. Sebagai contoh, dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Metro TV secara aktif mendukung pasangan Anie-Sandi, sedangkan detik.com menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pasangan Ahok-Jarot.

Kedua, TVRI, sebagai lembaga penyiaran milik negara, pernah terlibat dalam pemihakan terhadap partai penguasa dalam sejarah pemilu di Indonesia. Hal serupa juga terjadi dalam sejarah politik di Malaysia tahun 1990, Banglades tahun 1991, Slovenia tahun 1990, dan Namibia tahun 1989, di mana negara-negara tersebut melarang media massa menyiarkan kampanye, sehingga hanya partai penguasa yang memiliki hak dan kontrol penuh terhadap penggunaan media televisi. Situasi ini menjadikan media sebagai saluran yang mendukung pemerintah yang berkuasa. Dalam konteks kekuasaan otoriter, independensi media massa dapat dipertanyakan karena media sangat tergantung pada kekuasaan rezim. Ini membawa dampak yang sangat membahayakan eksistensi media sebagai pilar penting dalam membangun demokrasi. Dalam sistem politik yang otoriter dan sentralistik, pemerintah memiliki wewenang untuk menekan media, menahan wartawannya, atau bahkan memaksa media untuk menjadi alat politik rezim yang berkuasa.

Ketiga, Proses politik pilkada serentak memerlukan biaya yang sangat tinggi, sehingga pasangan calon yang memiliki sumber daya finansial yang cukup, lebih leluasa menggunakan media massa. Sebaliknya, bagi calon pasangan yang kurang mampu secara finansial, sangat sulit untuk mendapatkan akses ke media massa. Bima Nugraha juga setuju dengan pandangan ini, mengakui bahwa biaya periklanan yang tinggi menjadi hambatan bagi pasangan kepala daerah yang ingin menggunakan media massa dalam pilkada serentak (Nugroho, 1999).

Keempat, Pemerintah kadang-kadang memberlakukan pembatasan terhadap pesaing partai politik yang ingin menggunakan media asing untuk menyampaikan pesan politik di luar wilayah pengaturan nasional (Nugroho, 1999). Meskipun di Indonesia tidak ada pembatasan penggunaan media asing, terdapat fenomena yang kurang masuk akal, di mana pilkada terbatas oleh batasan geografis-teritorial. Pada situasi tersebut, pasangan calon terkadang memilih untuk menggunakan media nasional untuk iklan politik atau kampanye, meskipun pemilihan dilaksanakan di wilayah tempat mereka mencalonkan diri dan media massa lokal tidak dimanfaatkan, baik itu radio, televisi, maupun surat kabar.

Selain keempat tantangan yang dihadapi media dalam pilkada serentak, perlu dicatat dengan kritis untuk membangun kenetralan dan kekritisan media dalam membentuk opini publik dalam pilkada. Ini menjadi penting atas tiga alasan. *Pertama*, hukum pers memberikan kebebasan untuk melakukan kritik yang bersifat objektif dan konstruktif terhadap calon pemimpin, partai

politik, politisi, maupun lembaga pemerintah. *Kedua*, jurnalis dan media selalu berpegang pada prinsip self-censorship dalam menjalankan tugas profesionalnya. *Ketiga*, media dan jurnalis dilarang membuat laporan palsu, namun diharapkan menyampaikan berita yang akurat dan berdasarkan fakta.

KESIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, media massa memiliki peran sentral sebagai pembawa informasi yang akurat dan seimbang kepada publik. Kode Etika Jurnalistik menekankan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam melaporkan peristiwa. Tradisi media independen, terutama di Eropa dan Amerika, mengedepankan nilai kebebasan pers.

Hubungan antara media dan pemerintah harus dibangun atas dasar kemitraan dan saling menghormati, sambil menjaga tanggung jawab terhadap kebenaran informasi. Namun, media dihadapkan pada sejumlah problematika dalam konteks pemilu, termasuk disrupsi digital, konsentrasi kepemilikan media, dan kekhawatiran terkait ketidakadilan dalam pemberitaan politik.

Tantangan media ke depan mencakup partisanship, biaya tinggi dalam proses politik, dan pembatasan terhadap penggunaan media asing. Dalam menghadapi semua ini, penting untuk terus memperjuangkan transparansi, kenetralan, dan kebebasan media sebagai pilar penting dalam membangun demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

Hisyam, Muh.(2003).*Krisis Masa Kini dan Orde Baru*.Jakarta : YOI.

Kompas. *AJI Temukan Enam Masalah di Media Jelang Pemilu 2024. Artikel.* https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/23/enam-masalah-media-jelang-pemilu-2024.

Nugroho,Bimo.(1999).*Meliput Pemilu*.Jakarta : ISAI.

Rahayu, Ninik.(2022).*Jurnal Dewan Pers*.Jakarta: Dewan Pers.

Sularto, ST.(2011).*Syukur Tiada Akhir,Jejak Langkah Jakop Oetama*.Jakarta:Kompas.

Suyanto, Joko.(2010).*Demokrasi Kita & Pemikiran Politik*.Jakarta:Gramedia.

Tapsell, R. (2017*). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital.* Banten: CV Marjin Kiri.

Winters, J. A. (2014). *Oligarchy and democracy in Indonesia*. In Beyond Oligarchy (pp. 11-34). Cornell University Press.